1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Perkembangan harga bahan pangan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama Triwulan III Tahun 2026, yang meliputi periode Juli sampai dengan September, menunjukkan adanya fluktuasi harga berupa kenaikan dan penurunan pada sejumlah komoditas yang dipantau oleh TPID sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Uraian lebih lanjut mengenai perkembangan harga masing-masing komoditas disajikan pada pembahasan berikut :

   1. Pada bulan Juli 2026, perkembangan harga bahan pangan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga pada sejumlah komoditas. Komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu jeruk lokal, dari Rp13.000/kg menjadi Rp15.000/kg, serta kacang tanah, dari Rp41.000/kg menjadi Rp45.000/kg. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi cabai merah keriting, dari Rp55.000/kg menjadi Rp44.000/kg; cabai rawit, dari Rp90.000/kg menjadi Rp41.000/kg; bawang merah, dari Rp65.000/kg menjadi Rp48.000/kg; telur ayam ras, dari Rp32.500/kg menjadi Rp31.500/kg; serta kentang, dari Rp16.000/kg menjadi Rp15.000/kg. Secara umum, perkembangan harga pada bulan Juli menunjukkan bahwa sebagian besar komoditas yang dipantau mengalami penurunan harga. Penurunan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit, diikuti bawang merah dan cabai merah keriting.

   2. Pada Bulan Agustus terjadi kenaikan pada komoditas pangan yaitu cabai rawit dari harga Rp. 56.000/kg menjadi Rp. 135.000/kg dan telur ayam ras dari Rp. 31.000/kg menjadi Rp. 32.500/kg. komoditas yang mengalami penurunan yaitu Cabai Merah keriting dari Rp. 40.000/Kg menjadi Rp. 38.000/kg, Bawang Merah dari harga Rp. 48.000/kg menjadi Rp. 46.000/kg. Bawang putih dari harga Rp. 50.000/kg menjadi Rp. 45.000/kg.

   3. Pada bulan September 2026, perkembangan harga bahan pangan strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga pada sejumlah komoditas. Komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu cabai rawit, dari Rp135.000/kg menjadi Rp150.000/kg; bawang merah, dari Rp46.000/kg menjadi Rp49.000/kg; ikan tongkol, dari Rp38.000/kg menjadi Rp43.000/kg; serta kentang, dari Rp15.000/kg menjadi Rp18.000/kg. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu cabai merah keriting, dari Rp106.000/kg menjadi Rp96.000/kg. Secara umum, perkembangan harga pada bulan September menunjukkan bahwa kenaikan harga terjadi pada sebagian besar komoditas yang dipantau, terutama cabai rawit, ikan tongkol, dan kentang. Kenaikan harga cabai rawit perlu mendapat perhatian khusus karena komoditas tersebut mengalami peningkatan harga di tengah tingginya harga di pasaran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pengendalian Inflasi pada Periode Triwulan III tahun 2026, antara lain :

   1. Dampak Fenomena El Nino terhadap Ketersediaan Bahan Pangan. Fenomena El Nino yang berdampak pada kondisi cuaca dan ketersediaan air berpotensi mengganggu produksi pertanian, sehingga ketersediaan sejumlah bahan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami keterbatasan. Kondisi ini dapat memengaruhi

keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat serta berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas pangan.

2. Keterbatasan Pasokan dan Kenaikan Harga Cabai Rawit. Pada akhir Triwulan III, harga cabai rawit petani lokal mencapai Rp150.000/kg, lebih tinggi dibandingkan cabai rawit yang didatangkan dari Mataram sebesar Rp120.000/kg dan dari Jawa sebesar Rp100.000/kg. Tingginya harga cabai rawit lokal dipengaruhi oleh keterbatasan hasil panen akibat faktor cuaca. Sementara itu, pasokan cabai rawit dari luar daerah juga masih terbatas, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan menyebabkan tekanan kenaikan harga.
3. Keterbatasan Anggaran untuk Pelaksanaan Intervensi Pasar. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya kegiatan operasi pasar dan Gerakan Pasar Murah. Kondisi ini membatasi ruang gerak TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melakukan intervensi harga dan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Kebijakan Pengendalian Inflasi daerah telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain:

   1. Penanganan Kenaikan Harga Cabai Rawit. TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan rapat internal untuk membahas kenaikan harga cabai rawit, mengingat pada bulan September 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mencatat harga cabai rawit tertinggi di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, TPID mengajukan permohonan dukungan pasokan cabai melalui Dinas Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, dilakukan percepatan penanaman cabai melalui bantuan seluas 10 hektare di dua lokasi, yaitu Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Modayag, serta inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memantau perkembangan harga dan distribusi cabai rawit.
   2. Monitoring Ketersediaan dan Stabilitas Harga Beras. Dalam upaya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga beras, TPID melaksanakan monitoring penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan monitoring Kios Pangan dan Rumah Pangan Kita (RPK) di Kecamatan Kotabunan, Motongkad, dan Modayag guna memantau ketersediaan pasokan serta perkembangan harga beras di tingkat masyarakat.
   3. Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Periode Juli–September 2026. Pada Triwulan III Tahun 2026, telah dilaksanakan penyaluran dan penyerahan bantuan pangan untuk masyarakat di tujuh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Total Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebanyak 8.509 penerima, dengan jumlah beras yang disalurkan sebesar 255.270 kg. Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga bahan pangan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   1. Permohonan Dukungan Pasokan Cabai Rawit. Permohonan dukungan pasokan cabai melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

masih menunggu tanggapan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan tindak lanjut secara berkala agar dukungan pasokan dapat segera terealisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan cabai rawit di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan menekan kenaikan harga.

2. Peningkatan Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan. Kegiatan monitoring penyaluran bantuan pangan, Kios Pangan, dan Rumah Pangan Kita (RPK) perlu dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga bahan pangan. Hasil monitoring tersebut juga perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan apabila ditemukan kenaikan harga atau keterbatasan pasokan di pasar.
3. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Pangan. Penyaluran bantuan pangan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) perlu terus dioptimalkan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait perlu diperkuat untuk memastikan seluruh penerima memperoleh bantuan sesuai ketentuan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Pasokan dan Produksi Cabai Rawit. TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti permohonan dukungan pasokan cabai melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Selain itu, perlu dilakukan percepatan realisasi bantuan penanaman cabai seluas 10 hektare di Kecamatan Tutuyan dan Modayag serta penguatan koordinasi dengan petani lokal untuk meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pasokan cabai rawit.
2. Peningkatan Pemantauan Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan. TPID perlu melaksanakan monitoring harga, stok, dan distribusi bahan pangan secara berkala, khususnya terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan. Hasil pemantauan perlu dijadikan dasar dalam menentukan langkah intervensi yang tepat, termasuk pelaksanaan inspeksi pasar serta penguatan koordinasi dengan distributor, pedagang, dan perangkat daerah terkait untuk menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
3. Optimalisasi Penyaluran Bantuan Pangan dan Penguatan Intervensi Pasar. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah secara terarah, terutama pada saat terjadi kenaikan harga komoditas pangan strategis, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.